



**PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN PATI DALAM PEMBANGUNAN  
DESA WISATA MELALUI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT (STUDI DI DESA TALUN KECAMATAN  
KAYEN KABUPATEN PATI )**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:  
Amalia Fitriani  
NIM 3312415005

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
**JURUSAN POLITIK KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2019**

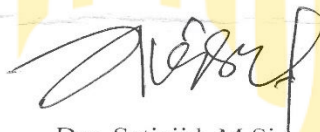
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Jumat*

Tanggal : *26 Juli 2019*

Pembimbing Skripsi I



Drs. Setiajid, M.Si  
NIP. 196006231989011001

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si  
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 8 Agustus 2019

Penguji I

Noorochmat Isdaryanto S.S., M.Si.  
NIP. 197112042010121001

Penguji II

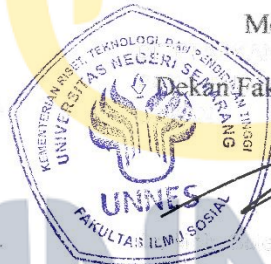
Erisandi Arditama, S.IP., M.A.  
NIP. 198705012018031001

Penguji III

Drs. Setiajid, M.Si.  
NIP. 196006231989011001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.  
NIP. 196308021988031001

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 23 Juli 2019

Penulis



Amalia Fitriani  
NIM 3312415005

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari fisik belaka, namun harus mampu memberdayakan dan memandirikan masyarakat.

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua saya Bapak Moh Sholikin dan Ibu Hani Rahmawati, serta adik saya Fahri Septiansyah yang selalu memberikan dukungan moril, materi, serta do'a di setiap langkah untuk kesuksesan saya.
- ❖ Sahabat dan keluarga Ilmu Politik Angkatan 2015
- ❖ Almamater kebanggaan saya Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- ❖ Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Pati serta Masyarakat Desa Talun Kec. Kayen Kab. Pati yang sudah membantu dalam proses penelitian skripsi ini.

## SARI

Fitriani, Amalia. 2019. *Peran Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati Dalam Pembangunan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati)*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Setiajid, M.Si. 120 halaman.

**Kata Kunci: Pembangunan Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat, Peran**

Pembangunan Desa wisata diarahkan untuk memanfaatkan potensi yang ada serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat daerah tujuan wisata agar lebih sejahtera. Salah satunya adalah dengan memberdayakan masyarakat sekitar Desa Wisata. Peran Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan Desa wisata sangat penting, mengingat Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang mengatur pembangunan berdasarkan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran, faktor pendorong dan juga faktor penghambat Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam melakukan pembangunan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan fokus penelitian peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, serta faktor penghambat dan pendorong pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa Wisata Talun (studi strukturasi peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pada masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Sumber data diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Strukturasi politik dalam Pemerintahan belum tentu menjembatani strukturasi sosial masyarakat dalam satu sistem. (2) kegiatan pemberdayaan dilakukan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan cara *enabling* (3) Faktor penghambat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pembangunan Desa wisata pemancingan air tawar ini meliputi terbatasnya sumber daya manusia, kekhawatiran adanya investor, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan Desa wisata Talun. Faktor pendorong meliputi tersedianya anggaran, dan berjalannya kemitraan, serta adanya kemandirian masyarakat Desa Talun. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kontribusi terkait pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat Desa wisata dengan menggunakan teori strukturasi.

Saran yang diberikan penulis adalah (1) Pemerintah Daerah harus bisa lebih fokus mengembangkan potensi yang ada dengan cara memberikan fasilitas yang memadai serta melakukan penataan ruang; (2) Pemerintah Daerah mampu merangkul masyarakat agar mau berkontribusi untuk mengembangkan Desa wisata; (3) Adanya regulasi atau aturan mengenai kebijakan pengembangan Desa Wisata Minat Khusus (4) Struktur sosial dari pemerintahan perlu diperbaiki sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan.



## ABSTRACT

Fitriani, Amalia. 2019. *The Role of the Department of Youth and Tourism in Pati Regency in the Development of Tourism Villages Through Community Empowerment (Study in Talun Village, Kayen District, Pati Regency)*. Final Project. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Sciences. Universitas Negeri Semarang. Advisor Drs. Setiajid, M.Sc. 120page.

**Keywords: Tourism Village Development, Community Empowerment, Role**

Tourism village development is directed to utilize the existing potential and improve the quality of life of the people in the tourist destination so that it will be more prosperous. One of them is by empowering the community around the Tourism Village. The role of the Regional Government in the development process of tourism villages is very important, considering that Indonesia as a Democratic State governs development based on regional autonomy. The purpose of this research is to find out how the roles, driving factors and also the inhibiting factors of the Department of Youth and Sports in developing tourism village through community empowerment in Talun Village, Kayen District, Pati Regency.

This study uses qualitative methods, with a focus on research on the role of the Department of Youth, Sports, and Tourism, what activities are carried out in community empowerment, and the inhibiting and supporting factors of community empowerment in the development of the Talun Tourism Village (structured study of the role of the Youth and Sports Department of Tourism in the Talun Village, Kayen District, Pati Regency). The data sources were obtained by using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The analysis technique was carried out in several stages, namely through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study showed that (1) Political structuration in government does not necessarily bridge the social structure of society in one system; (2) Meanwhile the process of community empowerment in Talun Tourism Village carried out by the the State Minister of Youth, Sports, and Tourism is by means of Enabling; (3) Factors inhibiting of the State Minister of Youth, Sports, and Tourism in the development of this freshwater fishing village include limited human resources, concerns about investors, and lack of community participation in the construction and development of Talun freshwater fishing village. While the driving factors include the availability of a budget, the running of a partnership between the State Minister of Youth, Sports, and Tourism and the group of Mina Sejahtera fish farmers, as well as the independence of the Talun Village community. The results of this study are expected to increase the repertoire of knowledge and contributions related to development through empowering the tourism village community by using structuration theory.

The suggestions that are given by the author are (1) the Local Government must be able to focus more on developing existing potential by providing adequate facilities and conducting spatial planning; (2) the Local Governments are able to embrace the community so that they want to contribute in developing tourism villages; (3) The existence of regulations or rules regarding the development policy

of Special Interest Tourism Village; (4) he social structure of the government needs to be improved according to the regulations that have been given.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pembangunan Desa Wisata Pemancingan Air Tawar (Studi Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati) “ dengan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang
4. Bapak Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M, Ketua Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan pengarahan dan saran dalam bidang akademik maupun pengembangan diri
5. Bapak Drs. Setiajid, M.Si, Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam proses penyusunan skripsi ini
6. Bapak Ibu Dosen serta Petugas Tata Usaha Jurusan Politik Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

7. Bapak Ibu Kepala Bidang dan Staff Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati yang sudah membantu penelitian ini.
8. Masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati
9. Pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar Mina Sejahtera
10. Keluarga besar Ilmu Politik Angkatan 2015.
11. Sahabat seperjuangan Meily, Asri, Kiky, Rastra, Opi, Puspa, Laili, Adi, Adit, Bagas, Fadil, Kanda, Fariz, Satria, Hasan, Machruf yang senantiasa membantu dan menemani dari awal kuliah.
12. Sahabat Raji dan Hakim, yang tidak pernah segan memberikan ilmu serta pengalaman untuk mengembangkan diri.
13. Teman seperbimbingan Afifah, Iswinarno, Kiky, Niha, Azka, Puspa yang selalu mengingatkan satu sama lain.
14. Keluarga BEM FIS 2016 Kabinet Lentera Merah Departemen Sosial Politik yang memberikan pengalaman luar biasa.
15. Keluarga BEM FIS 2017 Kabinet Dewantara Departemen Sosial Politik yang mengajarkan arti kedewasaan.
16. Keluarga BEM KM 2018 Langkah Baru, Sekertaris Kementerian yang selalu memberikan motivasi.
17. Sahabat-sahabati ku PMII Rayon Pancasila dan PMII Komisariat Al-Ghozali Semarang 2019 yang selalu merangkul, mengingatkan, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
18. Keluarga Kos Fortuna, Meily, Opi, Zahro, Fifit, Ratna, dan Mbak Ika yang selalu memberikan cerita setiap hari.

19. Keluarga KKN Kerjasama UNNES-UPI Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon yang sudah memberikan pengalaman berharga selama 42 hari.

20. Penyemangat luar biasa Risyda dan Annas, yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

21. Saudara, teman dan sahabat yang mendoakan atas kebaikan dan kelancaran tersusunnya skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terima kasih dan untaian doa, semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan berbagai pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aammiin

Semarang, 23 Juli 2019

Penulis



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

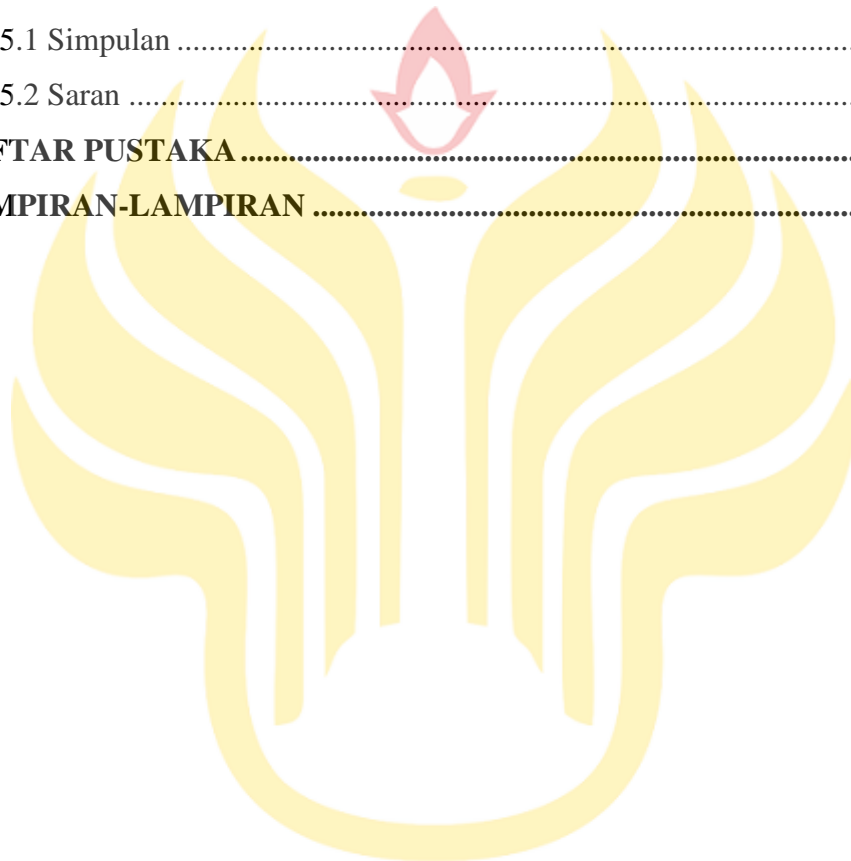
## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SARI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Batasan Istilah.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Deskripsi Teoritis.....	13
2.1.1 Tinjauan Tentang Peran.....	13
2.1.2 Tinjauan Tentang Pembangunan .....	18
2.1.3 Tinjauan Tentang Pariwisata .....	23
2.1.4 Tinjauan Tentang Desa Wisata.....	31
2.1.5 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat.....	37
2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan.....	51
2.3 Kerangka Berfikir .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
3.1 Dasar Penelitian .....	57

3.2 Lokasi Penelitian.....	58
3.3 Fokus Penelitian.....	58
3.4 Sumber Data Penelitian.....	59
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.6 Uji Validitas Data .....	63
3.7 Teknik Analisis Data.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	67
4.1.1 Gambaran Umum Desa Wisata Talun .....	67
a. Keadaan Geografis Desa Talun .....	67
b. Potensi Sumber Daya Manusia Desa Talun.....	70
c. Sejarah Desa Wisata Pemancingan Ikan Air Tawar .....	71
d. Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Sejahtera .....	75
e. Sarana dan Prasarana Desa Wisata Pemancingan Ikan Air Tawar .....	78
4.1.2 Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata .....	88
4.1.3 Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Bidang Promosi Pariwisata.....	94
4.1.4 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata dalam pembangunan Desa wisata .....	98
a. Faktor Penghambat Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata dalam Pembangunan Desa wisata .....	98
b. Faktor Pendorong Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata dalam Pembangunan Desa wisata .....	100
4.2 Pembahasan .....	102
4.2.1 Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pembangunan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat .....	102

4.2.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pembangunan Desa wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat.....	112
--	-----

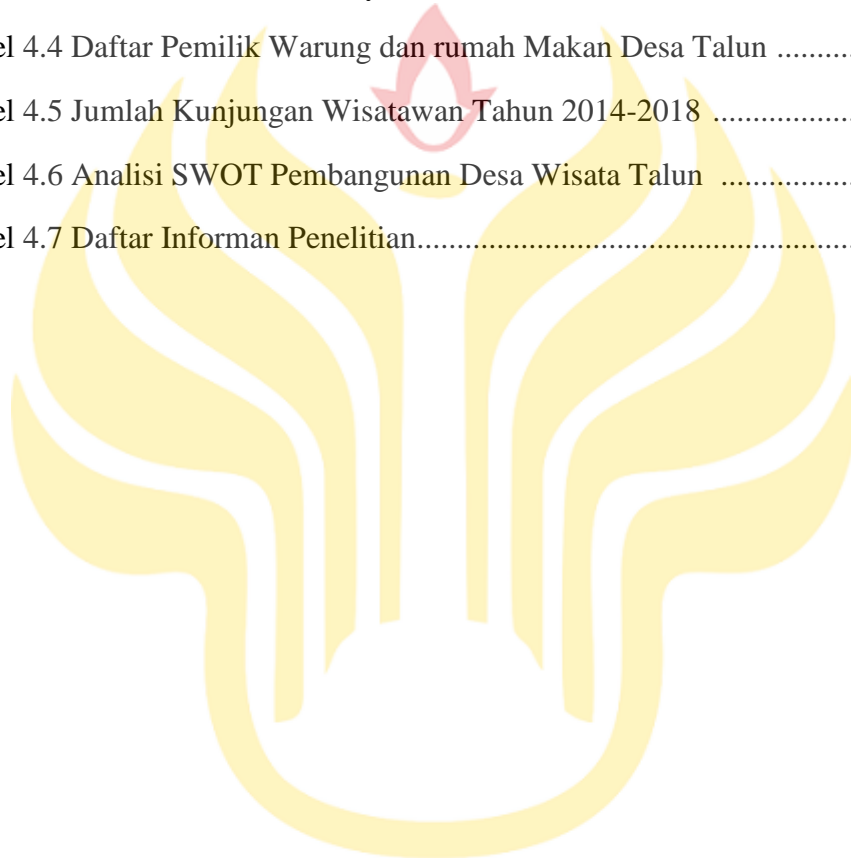
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>114</b>
5.1 Simpulan .....	114
5.2 Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>121</b>



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tata Guna Tanah Desa.....	68
Tabel 4.2 Pendidikan Masyarakat Desa Talun.....	70
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Talun.....	71
Tabel 4.4 Daftar Pemilik Warung dan rumah Makan Desa Talun .....	85
Tabel 4.5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2014-2018 .....	87
Tabel 4.6 Analisi SWOT Pembangunan Desa Wisata Talun .....	108
Tabel 4.7 Daftar Informan Penelitian.....	148



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

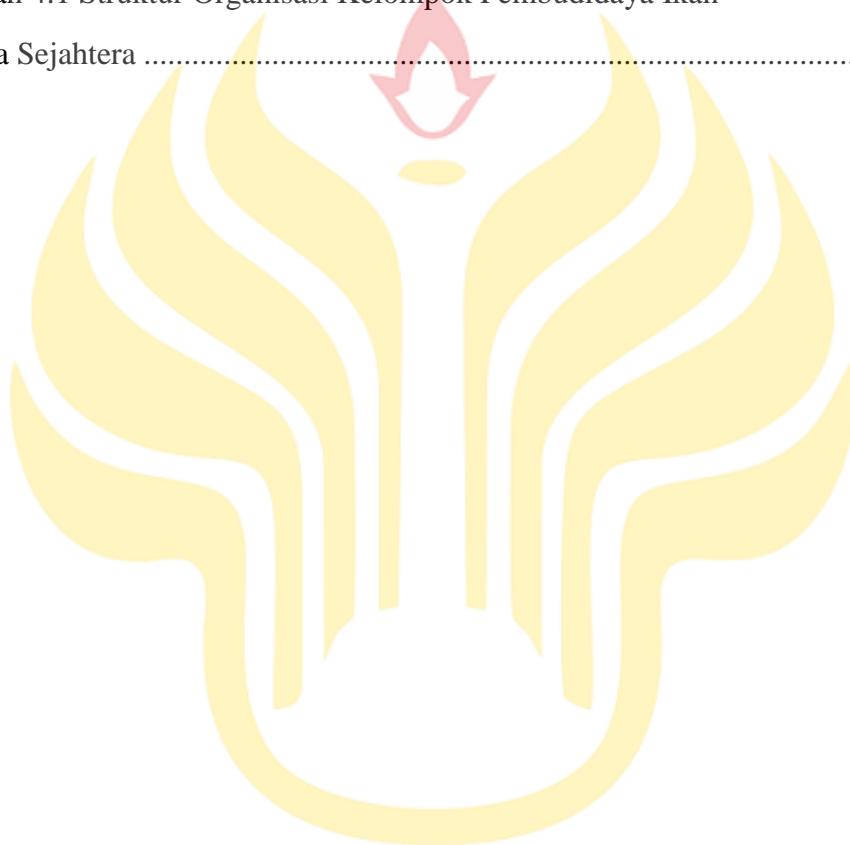


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Pati .....	69
Gambar 4.2 Peta Desa Talun.....	69
Gambar 4.3 Piagam Penghargaan dari Gubernur Jateng Tahun 2013 .....	74
Gambar 4.4 Gerbang Pintu Masuk Desa Wisata Talun .....	80
Gambar 4.5 Pintu Masuk Gapura Desa Wisata Talun .....	80
Gambar 4.6 Keadaan Jalandan Listrik Desa Wisata Talun .....	82
Gambar 4.7 Lokasi Kolam Pemancingan Ikan Milik Warga Desa Talun .....	84
Gambar 4.8 Salah Satu Lokasi Rumah Makan Di Desa Wisata Talun .....	86
Gambar 4.9 Promosi Desa Wisata Talun Melalui TICPATI .....	96
Gambar 4.10 Promosi Desa Wisata Talun Melalui Website Pemerintah Daerah .....	96

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Model Stratifikasi Agen.....	47
Bagan 2.2 Dualitas Struktur.....	50
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Sejahtera .....	77



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rancangan Instrumen Penelitian .....	122
Lampiran 2. Pedoman Wawancara .....	138
Lampiran 3. Tabel 4.6 Daftar Informan Penelitian .....	148
Lampiran 4. Hasil Wawancara .....	149
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian .....	174
Lampiran 6. Surat Penetapan Dosen Pembimbing .....	178
Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian .....	179
Lampiran 8. Surat Rekomendasi Penelitian .....	181
Lampiran 9. Surat Balasan Izin Penelitian .....	189



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi, mengatur pembangunan berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pusat ke daerah sesuai dengan kemampuan dan keadaan daerah tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Ma'ruf, dkk (2017:193) mengungkapkan dengan adanya undang-undang tersebut memberi konsekuensi terhadap daerah untuk menggali dan memberdayakan potensi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi daerah kepada daerah Kota/Kabupaten diharapkan agar daerah tersebut mampu melakukan pembinaan dan pengembangan desa-desa agar memiliki prakarsa, inisiatif, dan meningkatkan kemampuannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Handoyo, 2010:102).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu dikembangkan dan diberdayakan. Pada umumnya, kegiatan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjelaskan bahwa tujuan dari kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan

rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Dalam pengembangan potensi wisata suatu wilayah harus diimbangi dengan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar daerah wisata. Hal ini tidak terlepas dari arahan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sebagaimana diungkapkan Sairin (2002:342) kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pariwisata dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan dalam pariwisata adalah sumber dayanya. Selain sumber daya manusia, sumber daya terkait dalam pengembangan pariwisata pada umumnya berupa sumber daya alam, sumber daya budaya dan sumber daya minat khusus. Pitana dan Diarta (2009:68) mengatakan sumber daya dalam konteks pariwisata diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, diperlukan pemahaman dan perencanaan yang baik dari pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan potensi serta sumber daya agar mampu mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata.

Upaya pengembangan Desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu solusi yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya proses pemberdayaan merupakan penciptaan suatu iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang

(Sulistiyani, 2004:79). Aprilia, dkk (dalam Sumbi dan Firdausi, 2016:41) mengatakan bahwa pembangunan yang berbasis masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat, direncanakan, serta dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang ada. Oleh sebab itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata, yaitu dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui *stakeholder* (individu, kelompok, kelembagaan). Peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa wisata sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian dan partisipatif masyarakat agar mampu mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi yang memberikan kewenangan kepada komunitas khususnya masyarakat lokal untuk mengelola pembangunannya termasuk sumber daya (Soetomo, 2008:266). Konsep ini lebih dikenal dengan *Community Based Tourism (CBT)* yang memberikan peluang kepada masyarakat daerah wisata untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Menurut Suansri (dalam Syafi'I dan Suwandono, 2015:53) *Community Based Tourism (CBT)* adalah pariwisata yang menitikberatkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya kedalam satu kemasan. Hal ini dikelola dan dimiliki masyarakat, untuk masyarakat, dengan tujuan memungkinkan pengunjung untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat lokal dan cara hidup. Dengan demikian, dalam konsep *Community Based Tourism (CBT)* peran

masyarakat lokal merupakan unsur terpenting yang memengaruhi kepentingan dalam pengembangan wisata.

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang cukup menarik, kaya akan sumberdaya alam berupa pegunungan, daratan, pantai dan laut. Secara administratif Kabupaten Pati memiliki 21 Kecamatan, 401 Desa, dan 5 Kelurahan. Kabupaten yang terkenal dengan semboyan “Pati Bumi Mina Tani” ini memiliki banyak destinasi wisata baik wisata sejarah, wisata religi, wisata keluarga, wisata belanja hingga wisata alamnya. Salah satu Kecamatan yang memiliki destinasi wisata menarik adalah Kecamatan Kayen. Kecamatan ini memiliki banyak destinasi wisata diantaranya adalah Bukit Pandang di Desa Durensawit, Goa Pancur yang terletak di Desa Jimbaran, Air Terjun Lorodan Semar di Desa Summersari, desa wisata Pemancingan Ikan Air Tawar di Desa Talun dan wisata religi Makam Syekh Jangkung ([patikab.go.id](http://patikab.go.id)).

Wisata budidaya dan pemancingan ikan di Desa Talun merupakan salah satu gagasan unik untuk mewujudkan pembangunan Desa wisata berbasis lokal dengan pengelolaan lahan pertanian menjadi tambak ikan air tawar yang mampu bersinergi dengan dunia pariwisata. Desa wisata merupakan salah satu penerapan pembangunan pariwisata masyarakat yang bersifat berkelanjutan. Wisata pembudidaya dan pemancingan Ikan air tawar ini termasuk dalam wisata minat khusus yang terbesar di Kabupaten Pati.

Kedadaan geografis Desa Talun Kecamatan Kayen terletak di selatan Ibukota Kabupaten Pati sekitar 17 Km. Luas wilayah Desa Talun sekitar 922,86Ha. Adanya lahan seluas 8 ha yang sebelumnya merupakan daerah rawa



dan dataran rendah, membuat lahan pertanian warga sering tergenang air yang kemudian dibudidayakan oleh warga sekitar menjadi tambak budidaya ikan tawar. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi tambak budidaya ikan yang saat ini mencapai 162 hektar, sangat berperan dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Potensi Desa Talun yang menjadi daerah budidaya ikan dan pemancingan ikan air tawar di Kabupaten Pati, didukung dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Pati nomor 556/039/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang menetapkan Desa Talun Kecamatan Kayen sebagai Desa wisata dan diresmikan oleh Gubernur Jawa tengah yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Gubernur Bibit Waluyo pada Tanggal 13 April 2013 (Fitrianti, 2014:206). Sehingga sampai saat ini Desa Talun dijadikan sebagai pelopor dan percontohan bagi desa lain di Kabupaten Pati sebagai Desa wisata dan budidaya ikan air tawar (Sofyan, 2016:47).

Desa wisata budidaya dan pemancingan ikan air tawar Talun menjadi obyek wisata favorit bagi wisatawan, terutama bagi wisatawan yang memiliki hobi memancing. Selain itu Desa wisata ini juga menawarkan pemandangan alam desa yang masih asri atau sekedar menikmati wisata kuliner olahan yang khusus menjual sajian dari ikan tawar. Hal ini terbukti dengan data statistik Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015, jumlah wisatawan Desa wisata Talun mencapai 49.560 orang. Data ini menunjukkan bahwa Desa Talun menjadi kunjungan objek wisata tertinggi daripada objek wisata lainnya di Kabupaten Pati. Salah satu tolak ukur

perkembangan pariwisata adalah dengan banyaknya jumlah pengunjung, karena dengan peningkatan jumlah pengunjung secara langsung akan diikuti dengan perkembangan sarana dan prasarana wisata tersebut.

Akan tetapi, potensi yang cukup besar di Desa wisata pemancingan ikan air tawar di Desa Talun, dihadapkan berbagai kendala. Meskipun sudah diterbitkan Surat Keputusan dari Bupati Pati, namun dalam proses pengembangan Desa wisata ini belum diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal dari Pemerintah Daerah karena pengembangannya masih mengalami stagnansi. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Berdasarkan Fitrianti (2014:205) hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati gambaran wisata di Desa Talun adalah tidak ada pengelolaan wisata secara profesional, karena pengelolaan tambak dan budidaya ikan masih dilakukan secara individu/pribadi. Selain itu juga masih perlu adanya penambahan fasilitas, seperti toilet umum dan lahan parkir yang belum disediakan oleh pengelola wisata.

Kurangnya kemitraan yang baik dari segi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat berupa keterampilan maupun pendanaan dalam kegiatan pengembangan pariwisata membuat UMKM masyarakat sekitar juga mengalami kendala karena kurangnya sumber daya manusia yang mengelola. Di sisi lain, karena Desa wisata ini mengandalkan sumber daya alam, dalam pengembangannya juga tergantung dengan cuaca. Anomali cuaca yang sulit diprediksi menjadi hambatan para petani apabila terjadi banjir yang mengakibatkan kerugian bagi petani karena ikan yang ada didalam tambak

tumpah ke daratan yang lebih rendah sehingga petani tambak tidak bisa menuai hasil panennya tersebut.

Dalam permasalahan tersebut, proses pembangunan sarana dan prasarana masih menjadi masalah yang belum kunjung usai. Hal ini seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bidang Pariwisata Kabupaten Pati. Karena salah satu penyebab kurangnya perencanaan pembangunan dalam mengembangkan potensi Desa wisata ini adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan tentang kepariwisataan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti memilih daerah Desa wisata Talun yang memiliki potensi wisata minat khusus budidaya dan pemancingan ikan air tawar sebagai obyek penelitian. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana peran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Pati dalam pembangunan Desa wisata pemancingan melalui pemberdayaan masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pembangunan Desa wisata pemancingan melalui pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Talun.

Atas dasar inilah perlu adanya kajian dan penelitian yang tepat untuk mengembangkan Desa Wisata Budidaya dan Pemancingan Ikan Air Tawar di Talun, sebagaimana peneliti mengambil judul penelitian: **“Peran Dinas**

## **Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati Dalam Pembangunan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati”**

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam pembangunan Desa Wisata melalui pemberdayaan masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?
2. apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam pembangunan Desa Wisata melalui pemberdayaan masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui bagaimana peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam pembangunan Desa Wisata melalui pemberdayaan masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
2. mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam

pembangunan Desa Wisata melalui pemberdayaan masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kontribusi terkait pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat Desa wisata bagi Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Politik Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang.
  - b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis yang akan datang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa informasidan masukan bagi pihak pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **1.5. Batasan Istilah**

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperjelas kata maksud yang hendak disampaikan berkaitan dengan judul. Adapun batasan istilah yang dimaksud yaitu:

## 1. Peran

Suhardono (1994:3) mengatakan bahwa peran diartikan pada seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Sedangkan Baron, dkk (dalam Sarwono dan Meinarno, 2015:171) mengatakan bahwa peran diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang menempati posisi tertentu dalam kelompok.

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam pembangunan Desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat Desa Talun.

## 2. Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata yang dimaksud dengan Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepemudaan olahraga dan pariwisata.

Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata yang dimaksud penulis adalah Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata khususnya Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata yang dilakukan di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

## 3. Pembangunan Desa Wisata

Pembangunan adalah salah satu upaya untuk memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada (Jamaludin, 2016:6). Dalam hal ini, pembangunan juga dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial yang sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu Desa wisata menurut Nuryanty (dalam Soemarno 2010:1) merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan kedalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Pembangunan pariwisata seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diartikan sebagai kegiatan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan pariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pembangunan Desa wisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam memajukan dan mengembangkan daerah Desa wisata pemancingan ikan air tawar dengan memperhatikan aspek aspek kepariwisataan.

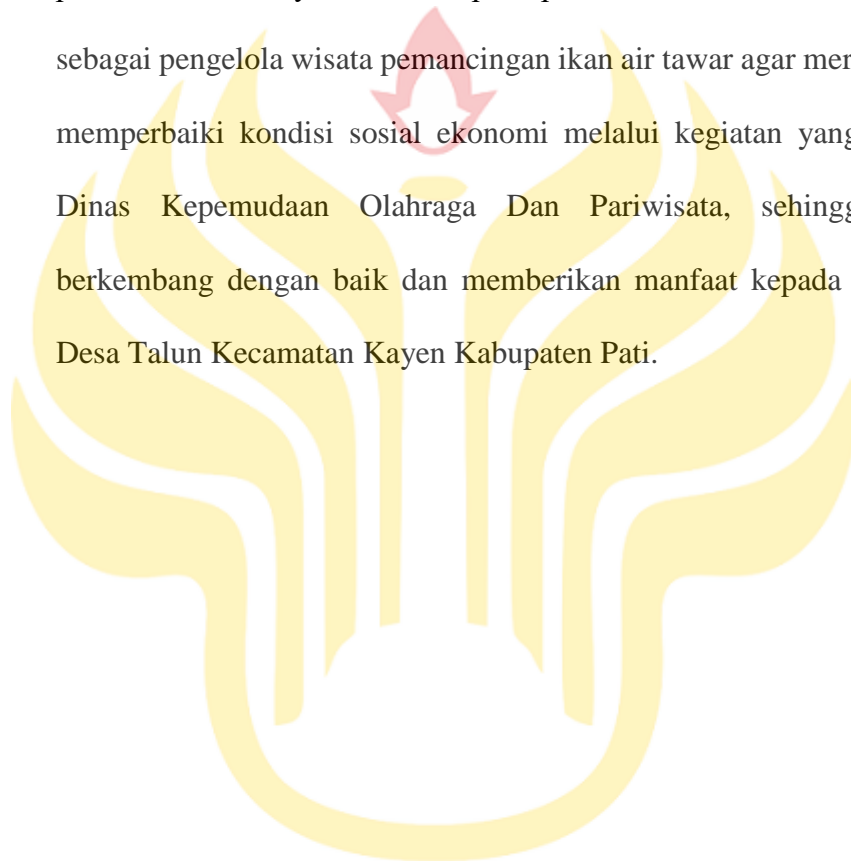
#### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Usman(2015:44) diartikan sebagai usaha melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang



dilandasi dengan perencanaan ke arah yang lebih baik, dalam rangka meningkatkan aset dan kapabilitas kelompok miskin.

Pada penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah proses memberdayakan kelompok petani tambak “Mina Sejahtera”, sebagai pengelola wisata pemancingan ikan air tawar agar mereka mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi melalui kegiatan yang dilakukan Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata, sehingga mampu berkembang dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Deskripsi Teoritis**

##### **2.1.1 Tinjauan tentang Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata**

###### **a. Pengertian Peran**

Istilah peran yang biasa digunakan dalam dunia teater sebagai karakteristik seorang aktor, dalam disiplin ilmu sosial memiliki arti sebagai seseorang yang menduduki suatu posisi dalam struktur sosial (Suhardono, 1994:3). Baron, dkk (dalam Sarwono dan Meinarno, 2015:171) mengatakan bahwa peran diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang menempati posisi tertentu dalam kelompok.

Sementara itu peran atau *roles* menurut Wibowo (2015:207) dimaksudkan sebagai serangkaian pola perilaku yang diharapkan dapat dihubungkan pada seseorang yang menguasai posisi tertentu dalam unit sosial.

###### **b. Aspek-aspek Peran**

Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015:215) membagi peran dalam empat golongan, yaitu :

- 1) Orang-orang yang mengambil peran

Orang-orang yang mengambil peran dapat dikategorikan dalam dua bagian. Pertama adalah aktor, yang sedang berperilaku melakukan suatu peran tertentu. Kedua target atau sasaran, yang mempunyai hubungan

dengan aktor dan perilakunya. Dalam hal ini aktor maupun target atau sasaran dapat berbentuk individu atau kelompok.

2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Wujud dari perilaku yang muncul dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari aktor satu ke aktor yang lain.

3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.

4) Kaitan antara orang dan perilaku

Untuk menetapkan kaitan antara orang dan perilaku atau perilaku dengan perilaku, ditetapkan beberapa kriteria yaitu:

- (a) Kriteria kesamaan
- (b) Derajat saling ketergantungan

Sementara itu (Soekanto, 2012:213) menjelaskan bahwa peran mencakup tiga hal, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

### c. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan definisi dan konsep peran di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan bahwa peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata khususnya Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Pemasaran Pariwisata.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga berubah nama menjadi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Hal ini dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki tugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
- 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;

- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
- 4) pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

#### 1. Visi dan Misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Visi dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati adalah *Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Dan Pelayanan Publik.*

Sedangkan misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Akhlak, Budi Pekerti Sesuai Budaya Dan Kearifan Lokal. (Pendidikan Ahlak Dan Budi Pekerti)
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan. (Pendidikan Dan Kesehatan)
- 3) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. (Pengentasan Kemiskinan)
- 4) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Mengutamakan Pelayanan Publik. (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)
- 5) Meningkatkan Pemberdayaan Umkm Dan Pengusaha, Membuka Peluang Investasi, Dan Memperluas Lapangan Kerja. (Lapangan Kerja)
- 6) Meningkatkan Daya Saing Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Perdagangan Dan Industri. (Daya Saing Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi)
- 7) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah. (Infrastruktur Daerah)
- 8) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Guna Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan. (Lingkungan Hidup)

#### 2. Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Subbagian Program dan Keuangan;

- b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
  - a) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda;
  - b) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
- 4) Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
  - a) Seksi Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi;
  - b) Seksi Pembinaan Olah Raga Prestasi.
- 5) Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
  - a) Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
  - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.
- 6) Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
  - a) Seksi Promosi Pariwisata;
  - b) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- 7) Kelompok jabatan fungsional.
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Sementara itu dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang bertanggung jawab dalam pariwisata adalah Bidang Destinasi Pariwisata yang terdiri dari Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata serta Bidang Pemasaran Wisata yang terdiri dari Seksi Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pitana dan Gayatri (2005:95) mengemukakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam pariwisata sebagai berikut:

- 1) Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Masyarakat, swasta, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata berjalan dengan baik.
- 2) Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Pemerintah. Pada prakteknya pemerintah

bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

- 3) Dinamisator, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

### **2.1.2 Tinjauan tentang Pembangunan**

#### **a. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik (Soetomo, 2012:166). Handoyo (2010:247) menjelaskan pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana terhadap kondisi sosial, budaya dan lingkungan. Sementara itu Gunawan Sumodiningrat, dkk (dalam Jamaludin, 2016:5) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang historikal, dimana prosesnya bergulir dari waktu ke waktu tanpa berhenti, dan perubahan itu sendiri tidak pernah berganti.

Proses perbaikan dalam pembangunan yang dilakukan memerlukan pengerahan sumber daya manusia agar mencapai tujuan dan cita-cita. Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu mengalami perubahan. Inti dari sebuah pembangunan bukan hanya



sekedar perubahan fisik dan material, akan tetapi juga perubahan sikap masyarakat.

Secara nasional, pembangunan menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut menurut Ndraha (dalam Soetomo, 2008:313) bukan hanya memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, akan tetapi meningkatkan kesejahteraan warganya. Negara dituntut untuk berperan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, yang didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat boleh memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Suharto (2014:5) menjelaskan, apabila disederhanakan fungsi pembangunan nasional dapat dirumuskan kedalam tiga tugas utama yang harus dilakukan sebuah Negara-Bangsa, yakni pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat dan pengembangan manusia. Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada, bagaimana caramelakukan usaha untuk meningkatkan pendapatan finansial yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat lebih merujuk kepada bagaimana Negara mampu merawat dan melindungi warga negaranya dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupan seperti menderita sakit, kemiskinan, atau tertimpa bencana alam dan sosial. Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Secara sosiologis, yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi, tidak hanya pada golongan elite, akan tetapi juga menyeluruh sampai ke lapisan terbawah. Dengan kata lain, pembangunan dalam arti kata sosiologi ditujukan pada pemberantasan terhadap angka kemiskinan (Jamaludin, 2016:3).

Hal ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembangunan adalah cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan, sementara masyarakat merupakan tenaga pembangun dan dampak pembangunan. Dengan kata lain, masyarakat merupakan sebuah subjek sekaligus objek dalam pembangunan.

#### **b. Strategi Pembangunan**

Kegiatan pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia, masih terfokus pada isu-isu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu diperlukan strategi dalam sebuah pembangunan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usman (2015:5) menjelaskan beberapa strategi dalam proses pembangunan yang lazim di implementasikan, yaitu:

- 1) Strategi *enabling*, yaitu usaha melakukan perubahan dengan menempatkan pemerintah atau swasta sebagai pihak yang memfasilitasi sumber daya baik berupa ide, dana maupun material.
- 2) Strategi *empowering*, yaitu usaha yang dilakukan untuk melakukan perubahan dengan menempatkan masyarakat dan pemerintah atau swasta pada posisi yang sejajar. Dalam strategi ini masyarakat

ditempatkan sebagai subyek pembangunan dan terlibat secara aktif dalam proses formulasi dan eksekusi kebijakan.

- 3) Strategi *delegating*, yaitu usaha melakukan perubahan dengan cara menempatkan masyarakat lebih dominan daripada pemerintah ataupun swasta.

Oleh sebab itu, untuk keberlangsungan pembangunan diperlukan beberapa syarat, diantaranya partisipasi masyarakat yang secara aktif memecahkan masalah masalah dan memiliki sifat terbuka bagi pikiran-pikiran dan usaha-usaha baru. Selain itu, diperlukan juga adanya kelompok-kelompok yang kreatif atau minoritas pemimpin-pemimpin yang kreatif, serta massa yang kritis (Soekanto, 2012:360).

Dalam proses pembangunan, bukan hanya perubahan secara fisik. Akan tetapi, pembangunan secara non fisik juga sangat diperlukan. Dalam proses pembangunan, adanya koordinasi dan juga manajemen sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Menurut Burkard dan Medik yang dikutip Oka A. Yoeti (2001:188) (dalam Yudiyanti dan Rahayu, 2014:22) kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata diantaranya adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dalam menyusun strategi pengembangan dan perencanaan pemasaran pariwisata di daerahnya dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan kegiatan pariwisata di daerah itu.

- 2) Mewakili kepentingan daerah dalam pertemuan-pertemuan yang menyangkut kepentingan pengembangan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 3) Mendorong pembangunan fasilitas dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan selera wisatawan yang terdiri dari bermacam-macam segmen pasar.
- 4) Menyusun perencanaan pemasaran dengan mempersiapkan paket-paket wisata yang menarik bersama dengan para perantara, meningkatkan kualitas pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada wisatawan secara periodik.

Sementara itu, menurut Oka A. Yeoti (dalam Yudiyanti dan Rahayu, 2014:23), organisasi yang telah diberikan wewenang dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya harus dapat menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah wilayahnya, karena fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya adalah:

- 1) Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan dengan segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya.
- 2) Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata.
- 3) Mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.

- 4) Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di waktu-waktu yang akan datang.
- 5) Menyediakan semua perlengkapan dan fasilitas untuk kegiatan pariwisata.
- 6) Merumuskan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara teratur dan berencana

### **2.1.3 Tinjauan tentang Pariwisata**

Menurut (Rohimah, Hariyoko dan Ayodya, 2018) pariwisata merupakan sebuah kegiatan oleh seseorang atau orang secara berkelompok yang memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan sebuah kegiatan perjalanan menikmati sebuah tempat dengan tujuan berekreasi atau mencari hiburan. Dalam UU No 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pitana dan Diarta (2009:12) mengungkapkan bahwa konsep pariwisata mengandung makna perjalanan yang dilakukan seseorang, yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja.

#### **a. Daya Tarik Wisata**

UU No 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan,

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Damanik dan Weber (dalam Brahmanto, dkk 2017:590) menekankan pentingnya keaslian dalam menentukan kualitas daya tarik wisata, baik dari segi originalitas, maupunotentisitasnya.Kualitas daya tarik merupakan faktor utama yang menentukan kepuasan dan loyalitas wisatawan dalam berwisata alam, sedangkan loyalitas dalam dimensi bisnis merupakan aspek yang menjamin keberlanjutan bisnis..

#### **b. Sumber Daya Pariwisata**

Tidak dapat dipungkiri bahwa berjalannya industri pariwisata sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia. Menurut (Pitana dan Diarta, 2009:68) mengartikan sumber daya sebagai berikut:

*“...resources are not, they become: they are not static but expand and contract in response to human wants and human actions  
Resources are attributes of thr natural world that are no more than  
„neutral stuff until a combination of increased knowledge, expanding technology, and changing individual and societal objectives result in their presence being perceived, their capacity to satisfy human wants....”.*

Sumber daya merupakan atribut alam yang bersifat netral sampai ada campur tangan manusia dari luar untuk mengubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pitana dan Diarta, 2009:68).

Sumber daya yang terkait dengan pengembangan pariwisata disamping sumber daya manusia, umumnya berupa sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya minat khusus.

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir dalam setiap elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Singkatnya, faktor sumber daya manusia sangat menentukan eksistensi pariwisata .

Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pariwisata, McIntosh et al., dalam (Pitana dan Diarta, 2009:72) memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia, seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman.

2) Sumber daya alam

Menurut Fennel (dalam Pitana dan Diarta, 2009), sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut:

(a) Lokasi geografis, menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lainnya.

(b) Iklim dan cuaca, yang ditentukan oleh latitude dan elevation diukur dari permukaan air laut, daratan, pegunungan, dan sebagainya.

Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari



lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya.

- (c) Topografi dan landforms. Bentuk umum dari permukaan bumi (topografi) dan struktur permukaan bumi yang membuat beberapa areal geografis menjadi bentang alam yang unik (landforms). Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah/benua dengan wilayah/benua lainnya sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata.
- d. Surface materials. Menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam.
- (d) Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor, misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai/bahari, danau, sungai dan sebagainya.
- (e) Vegetasi, merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi suatu area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan formasi tumbuhan seperti ekowisata pada kawasan konservasi alam atau hutan lindung.
- (f) Fauna, beragam jenis binatang berperan cukup signifikan terhadap aktivitas wisata seperti melihat cara binatang makan dan hidup. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam tergantung dari elemen sumber dayanya dan kegunaan



yang dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan manusia seperti keajaiban dan keindahan alam, keragaman flora dan fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam, ekosistem yang belum terjamah manusia, rekreasi perairan, objek megalitikum, suhu serta curah hujan. Sehingga sumber daya alam dapat menjadi atraksi wisata alam.

### 3) Sumber daya budaya

Sumber daya budaya dapat menjadi wisata budaya, salah satunya dengan melihat dan mencoba kehidupan masyarakat suatu daerah mulai dari kebiasaan, adat istiadat hingga makanan tradisional.

Menurut Pitana dan Diarta (2009:75-76), Sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut:

- (a) Bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno dan sebagainya.
- (b) Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industry film dan penerbit.
- (c) Seni pertunjukan, drama, sendratari, lagu daerah, teater jalanan, eksinisi foto, festival dan event khusus.
- (d) Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, mesjid, situs, dan sejenisnya.

- (e) Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja dan sistem kehidupan setempat.
- (f) Perjalanan (trekking) ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik seperti berkuda, dokar, cikar dan sebagainya.
- (g) Mencoba kuliner setempat. Melihat persiapan, cara membuat, menyajikan dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan.

#### 4) Sumber daya minat khusus

Saat ini, pariwisata dengan minat khusus menjadi *trend* perkembangan pariwisata kedepan sebab calon wisatawan menginginkan jenis pariwisata yang fokus, yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan. Darsoprajitno (dalam Brahmanto, dkk 2017:590) Daya tarik wisata terdiri dari tataalam, masyarakat, dan hasil binaan. Dari ketiganya, ada beberapa unsur yang dapat dikembangkan secara khusus, sehingga disebut daya tarik wisata minat khusus.

Pada prinsipnya, pariwisata minat khusus mempunyai kaitan dengan petualangan. Secara fisik dapat menguras tenaga wisatawan, serta ada unsur tantangan yang harus dilakukan, karena bentuk pariwisata ini banyak terdapat di daerah terpencil, seperti: kegiatan tracking, hiking, pendakian gunung, rafting di sungai, dan lainnya, Fandeli (dalam Brahmanto, dkk 2017:590). Ada beberapa kriteria menurut Fandeli dalam Sudana (2013), yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam

menetapkan suatu bentuk wisata minat khusus yakni: (1) Learning, pariwisata yang mendasar pada unsur belajar; (2) Rewarding, pariwisata yang memasukkan unsur pemberian penghargaan; (3) Enriching, pariwisata yang memasukkan peluang terjadinya peningkatan pengetahuan antara wisatawan dengan masyarakat; (4) Adventuring, pariwisata yang dirancang dan dikemas sehingga terbentuk wisata petualangan.

### c. Promosi Wisata

Pitana dan Diarta (2009:177) mengemukakan promosi merupakan kegiatan komunikasi dimana organisasi penyelenggara pariwisata berusaha mempengaruhi khalayak dimana penjualan produknya bergantung. Sedangkan promosi menurut Tjiptono (2001:219) (dalam Mayasari, 2014) diartikan dengan aktivitas promosi yang berguna menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan mengingatkan target sasaran untuk loyal kepada produk yang ditawarkan.

Wahab menjelaskan (dalam Widyasti, 2013:12) bisa dikatakan bahwa pemasaran wisata adalah suatu arahan, proses, dan teknik-teknik manajemen sebuah badan usaha wisata untuk memasarkan wisata menuju sebuah perubahan dengan cara menawarkan wisata ke konsumen.

Menurut Soekadijo ( dalam Mayasari:2014), ada dua jenis kegiatan promosi:

- 1) Promosi langsung, ini dilakukan oleh semua lembaga yang berkaitan dengan pemasaran

- 2) Promosi tidak langsung, ini di tujukan untuk penyalur produk pariwisata, seperti biro atau agen perjalanan.

Selain promosi ada juga kegiatan publikasi yang harus disampaikan kepada konsumen melalui media massa, ada dua macam jenis publikasi:

- 1) Publikasi langsung, ini disampaikan langsung kepada sasaran tetapi tergantung daritujuan dan anggaran yang dimiliki. Biasanya publikasi semacam ini berbentuk leaflet, brosur, dapat juga berupa pameran, pekan pariwisata, dll.
- 2) Publikasi melalui media massa, publikasi ini memanfaatkan media massa untuk menyampaikan pesan ke khalayak dan juga ke konsumen potensial, dalam publikasi melalui media ini biasanya berupa harian dan majalah, poster, radio, bioskop dan televisi.
- 3) Publikasi intern, agar promosi dan publikasi dapat berhasil, maka kegiatannya juga harus berdasarkan oleh kebijaksanaan umum mengenai pemasaran, strategi pemasaran yang matang, memilih taktik pemasaran yang cocok, dan memilih sarana komunikasi yang sesuai.

#### **d. Ekonomi Kreatif Pariwisata**

Ooi (dalam Suparwoko, 2015:5) mengemukakan bahwa ekonomi kreatif dan sektor wisata merupakan dua hal yang saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Konsep kegiatan wisata dapat didefinisikan dengan tiga faktor, yaitu harus ada, yaitu: *Something to see*, *Something to do*, dan *Something to buy* ( Yoeti, 1985). *Something to see* terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata, *something to do* terkait dengan aktivitas

wisatawan di daerah wisata, sementara *something to buy* terkait dengan souvenir khas yang dibeli di daerah wisata sebagai memorabilia pribadi/wisatawan. Dalam tiga komponen tersebut, ekonomi kreatif dapat masuk melalui *something to buy* dengan menciptakan produk-produk inovatif khas daerah.

#### **2.1.4 Tinjauan tentang Desa Wisata**

##### **a. Pengertian Desa Wisata**

Objek wisata pedesaan merupakan salah satu bagian dari pariwisata yang keberadaannya menjadi favorit dikalangan wisatawan saat ini. Nuryanty (dalam Soemarno 2010:1) mengatakan Desa wisata merupakan suatu bentuk integritas antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara tradisi yang berlaku.

Chafid (dalam Susfenti, 2016:79) menjabarkan Desa wisata sebagai suatu wilayah yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktivitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik Desa wisata, misalnya atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya.

Terdapat dua konsep utama dalam komponen Desa wisata menurut Susfenti (2016:80) , yaitu sebagai berikut:

- 1) Akomodasi, yang merupakan sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- 2) Atraksi, yaitu seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif.

#### **b. Strategi Pembangunan Desa Wisata**

Dalam proses pembangunan Desa wisata, memerlukan kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Untuk mencapai sebuah perencanaan yang sistematis, diperlukan adanya perencanaan yang strategis. Beberapa tahapan perencanaan strategis dalam pembangunan pariwisata menurut Pitana dan Diarta (2009:109) adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan terlebih dahulu bisnis/usaha apa yang akan dimasuki dalam pariwisata tersebut, biasanya didirikan oleh misi organisasi yang tergantung pada jenis usaha apa yang dimasuki.
- 2) Menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai, yang merupakan tujuan utama dari sebuah organisasi, seperti penguasaan pasar yang melibatkan pengenalan produk baru. Tujuan organisasi ini harus mempunyai target kapan tujuan tersebut akan diwujudkan. Hal ini memberikan kerangka waktu, menetapkan tujuan jangka pendek, serta pencapaian dan tindakan yang diperlukan.
- 3) Mengumpulkan informasi dan pengetahuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kualitas keputusan organisasi yang diambil

sangat tergantung pada kualitas informasi yang dikumpulkan. Sumber informasi mungkin berasal dari pemerintah, industri atau sumber lainnya. Kemudian pengetahuan atau informasi diolah secara sistematis berdasarkan tujuan yang akan dicapai.

- 4) Menganalisis informasi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan,kelemaham, peluang dan tantangan dari organisasi. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - (a) Informasi yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan masa kini, baik yang menyangkut organisasi itu sendiri maupun lingkungan di luar orgaisasi yang mempengaruhi kehidupan organisasi.
  - (b) Informasi yang dapat membantu perencanaan memberikan perkiraan masa depan, misalnya dengan menggunakan analisis SWOT.
- 5) Menentukan tujuan khusus yang menentukan aktivitas yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi secara keseluruhan.
- 6) Menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.
- 7) Mendistribusikan sumber daya ke masing-masing program aksi untuk memberikan dampak pada strategi yang diambil.
- 8) Mengimplementasikan rencana.
- 9) Mengontrol dan memonitor hasil dan perbaikan jika diperlukan.

Sedangkan menurut Nuryanti (dalam Soemarno, 2010:3-4) dalam mengembangkan Desa wisata perlu adanya upaya-upaya yang ditempuh, diantaranya adalah:

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia ini bisa dilakukan dengan cara pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar atau workshop. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan keterampilan lain untuk menambah kegiatan usaha lainnya.

2) Kemitraan

Pola kemitraan atau kerjasama yang dilakukan antara pihak pengelola Desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak pembina Desa wisata, hal ini bisa dengan pihak Dinas Pariwisata daerah, antara lain seperti bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dll agar saling menguntungkan.

3) Kegiatan Pemerintah Desa

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pengembangan Desa wisata melalui acara seperti rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara upacara hari besar yang dilakukan di Desa wisata.

4) Promosi

Desa wisata harus dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu peran dari pemerintah desa dan kabupaten/daerah sangat dibutuhkan.



5) Mengadakan festival/pertandingan

Kegiatan rutin di Desa wisata ini perlu diselenggarakan agar mampu menarik minat wisatawan.

6) Membina organisasi warga

Pembinaan ini dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengembangan dan memajukan Desa wisata.

7) Kerjasama dengan Universitas

Sebaiknya menjalin kerjasama dengan Universitas di sekitar agar mampu memberikan masukan dan peluang bagi Desa wisata untuk meningkatkan pembangunan Desa wisata melalui program Kuliah Kerja Nyata atau Kuliah Kerja Praktik Lapangan.

**c. Kebijakan Pembangunan Desa Wisata**

Kebijakan merupakan sebagai arah atau tuntunan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh pemerintah. Post, et al (dalam Handoyo, 2012:5) memaknai kebijakan sebagai rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang mempengaruhi kehidupan penduduk negara secara substansial.

Adanya pembangunan pariwisata diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah. Dalam proses implementasinya, Pitana dan Diarta (2009:110-112) menjelaskan kebijakan pariwisata memerlukan beberapa tahapan, yaitu: 1) Mengevaluasi pasar; 2) Memilih lokasi yang cocok; 3) Mengidentifikasi pemain kunci (*stakeholder*); 3) Melakukan studi fisibilitas pasar dan keuangan; 4)

Merencanakan dan membuat desain konsep; 5) Membuat dokumentasi proposal; 6) Mengkonsultasikan dengan masyarakat; 7) Mengikuti proses perijinan; 8) Melengkapi proses investasi; 9) Mempersiapkan dokumentasi bangunan; 10) Fase konstruksi dan pembangunan; 11) Menyediakan rencana operasional.

Menurut United Nation-World Trade Organization (UN-WTO) (dalam Pitana dan Diarta 2009:113) peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata harus memperhatikan beberapa hal strategis dan bertanggung jawab, yaitu :

- 1) Membangun kerangka operasional dimana sektor publik dan swasta terlibat dalam denyut pariwisata.
- 2) Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya serta warisan budaya.
- 3) Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan sarana dan prasarana.
- 4) Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.
- 5) Menerjemakan kebijakan pariwisata yang disusun ke dalam rencana kongkret yang mungkin termasuk di dalamnya terdapat:
  - (a) Evaluasi kekayaan aset pariwisata, alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestarian;

- (b) Identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif;
- (c) menentukan persyaratan dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprasruktur yang dibutuhkan yang akan berdampak pada keragaman (*performance*) pariwisata, dan;
- (d) mengelaborasi program untuk pembiayaan dalam aktivitas pariwisata, baik sektor publik maupun swasta.

## **2.1.5 Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka serta mampu menjangkau sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan (Suharto, 2014:57-58).

Sulistiyani (2004;79) mengatakan pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri. Setiap masyarakat memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu, daya harus digali dan dikembangkan.

Sementara itu, pengertian pemberdayaan masyarakat dijelaskan oleh Usman (2015:44) yaitu usaha melakukan perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dilandasi dengan perencanaan ke arah yang lebih baik, dalam

rangka meningkatkan aset dan kapabilitas kelompok miskin. Sumodiningrat (dalam Mardikanto dan Totok 2015:52) mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mardikanto dan Totok 2015:51).

#### **b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Sulistiyani(2004:80) mengatakan tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Sementara itu, kemandirian yang didapat oleh masyarakat tidak dapat dicapai dengan waktu yang singkat, serta memerlukan proses yang panjang.

Hutomo (dalam Rohim, 2013:21-22) mengatakan secara umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Bantuan modal, salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam konteks ini, ada dua hal penting yang perlu dicermati yaitu: Pertama, lemahnya ekonomi masyarakat bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki

usaha, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi atau masyarakat yang tidak mengandalkan gaji. Kedua, bagaimana dampak yang dihasilkan dalam pemberian modal ini.

- 2) Bantuan sarana prasarana, usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana ditengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong masyarakat menggali potensi mereka.
- 3) Bantuan pendampingan, tugas utama dalam pendampingan sangat perlu dan penting sebagai fasilitator proses belajar dan mediator untuk masyarakat.
- 4) Kelembagaan, keberadaan sebuah lembaga atau organisasi ditengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting untuk menciptakan keberdayaan. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat dalam berkoordinasi dalam melakukan akses-akses yang diinginkan seperti permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya.

Sedangkan, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, diperlukan adanya strategi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Suhartono (2014:66-67) menyebutkan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga strategi, yaitu:

- 1) Strategi Mikro, dimana pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah untuk membimbing maupun melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

Strategi ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

- 2) Strategi Mezzo, dimana pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Strategi makro, pemberdayaan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian msyarakat, manajemen konflik. Strategi ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Ismawan yang dikemukakan Priyono (dalam Mardikanto dan Totok 2015:170) menetapkan adanya lima program strategi pemberdayaan msyarakat yang terdiri dari: 1) pengembangan sumber daya manusia; 2) pengembangan kelembagaan kelompok; 3) pemupukan modal masyarakat (swasta); 4) pengembangan usaha produktif; 5) penyediaan informasi tepat guna.

Mardikanto (dalam Mardikanto dan Totok 2015:172) menyimpulkan apapun strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan harus memperhatikan upaya-upaya:

- 1) Membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan kebijakan, sosial dan finansial dari berbagai pihak terkait
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana kerja para fasilitator
- 4) Memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalam masyarakat

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Menurut Purwanto (dalam Rohim, 2013:22-23) beberapa aspek yang dapat diketengahkan dalam proses pemberdayaan adalah:

- 1) Peran Pemerintah

Birokrasi pemerintah harus dapat menjalankan misinya serta harus meningkatkan kewenangannya sampai lapisan terendah agar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu:

- a. Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.
- b. Birokrasi juga harus bisa membangun aspirasi masyarakat, untuk itu birokrasi harus menyiapkan masyarakat sebaik baiknya, baik pengetahuannya, maupun cara bekerjanya agar upaya pemberdayaan masyarakat efektif.



- c. Birokrasi harus bisa membuka dialog dengan masyarakat, hal ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat membantu permasalahan yang tidak bisa di atasi sendiri oleh rakyat.
  - d. Birokrasi harus membuka jalur informasi serta akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak diperoleh sendiri.
  - e. Birokrasi harus menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak pada masyarakat yang lemah.
- 2) Organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri. Dalam hal ini, yang mempunyai potensi berperan besar adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili peran pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam menjalankan program pemerintah.
- 3) Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat kuasiformal seperti LKMD, PKK, Karang Taruna, Pokdarwis atau yang benar benar tumbuh dari masyarakat sendiri.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan atau biasa disebut dengan *Community-Based Tourism Development* merupakan salah satu strategi yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata. Selain itu, adanya pemberdayaan masyarakat lokal berbasis



*Community-Based Tourism (CBT)* juga akan mampu memberikan dampak yang dirasakan masyarakat.

*Community-Based Tourism (CBT)* menurut Muallisin (dalam Rohimah, dkk, 2019:365) merupakan pariwisata yang memahami adanya sebuah mempertahankan budaya atau kearifan lokal yang berbasis sosial dan lingkungan.

Murphy (dalam Sunaryo 2013:138) menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri. Sehingga semestinya kepariwisataan harus di pandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas setempat. Lebih lanjut, Murphy juga memberikan beberapa batasan pengertian terkait *Community-Based Tourism (CBT)* dengan pembatasan sebagai berikut:

- 1) Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
- 2) Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha usaha kepariwisataan yang juga bisa mendapatkan keuntungan dari pariwisata yang ada.
- 3) Bentuk kepariwisataan yang menuntun kepariwisataan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada

masyarakat yang kurang beruntung yang berada di wilayah destinasi wisata.

Sementara itu Yaman dan Mohd (dalam Sunaryo 2013:141) menggaris bawahi beberapa kunci pengaturan pembangunan pariwisata melalui pendekatan *Community-Based Tourism (CBT)*, diantaranya:

- 1) Adanya dukungan dari pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, maupun badan regulasi pengelolaan SDM dan penguatan kelembagaan
- 2) Adanya partisipasi dari *stakeholder, Community-Based Tourism (CBT)* secara umum bertujuan untuk penganeekaragaman industri kepariwisataan yang tumbuh dari masyarakat. Oleh karena itu keseluruhan anggota masyarakat dengan kemampuan kewirausahaan dapat menentukan/membuat kontak bisnis dengan tour operator, travel agent untuk memulai bisnis baru.
- 3) Pembagian keuntungan yang adil, baik keuntungan langsung yang diterima langsung oleh masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata maupun keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha kepariwisataan.
- 4) Penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan yang dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan.

- 5) Penguatan institusi lokal yang bertujuan mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya, dan pengunjung. Yang paling balik adalah terbentuknya lembaga sosial dengan kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat. Penguatan kelembagaan bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan individu dengan ketrampilan kerja yang diperlukan.
- 6) Adanya keterkaitan dan koordinasi yang efektif antara level regional dan nasional. Hal ini sangat strategis sebab komunitas lokal seringkali kurang mendapat akses *link* langsung dengan pasar nasional atau internasional sehingga manfaat kepariwisataan tidak sampai dinikmati di level masyarakat.

### c) Teori Strukturasi

Dalam proses pembangunan desa wisata agar mampu tercipta pemberdayaan berbasis masyarakat, diperlukan teori pendukung untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Oleh sebab itu, teori pendukung untuk memperkuat analisis proses pembangunan Desa wisata Talun ini adalah dengan menggunakan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens.

Teori strukturasi diperkenalkan oleh Anthony Giddens yang merupakan seorang teoritis asal Inggris yang lahir pada tanggal 18 Januari 1938. Karya Giddens yang pertama adalah buku dengan judul "*The Class Structure of Advance Societies*" yang pertama kali diterbitkan pada akhir 1930-an namun baru dikenal luas semasa pasca perang dunia kedua. Buku ini dapat dikatakan

sebagai inti dari pemikiran Giddens yang menguraikan teori strukturasi. Yang mana teori ini sebenarnya ingin menyelesaikan konflik besar dalam ilmu sosial yang terjadi sampai sekarang, yaitu konflik antara “struktur” dan “agensi”.

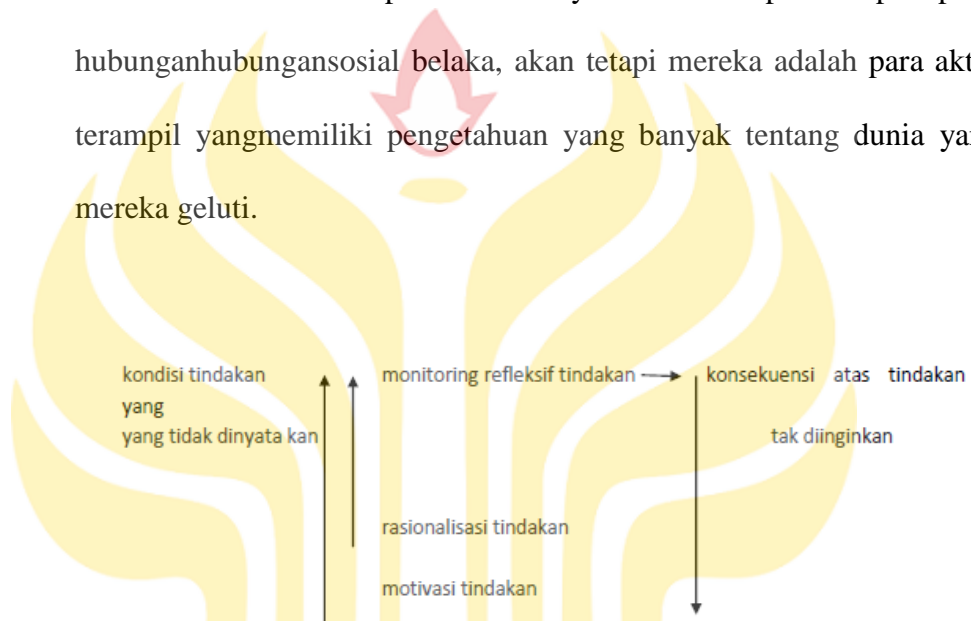
Dalam teori ini, Giddens menjelaskan (dalam Ashaf, 2006:210-211) struktur dan agensi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah, karena jika demikian akan muncul dualisme struktur-agensi. Struktur dan agensi, menurut Giddens, harus dipandang sebagai dualitas (duality), dua sisi mata uang yang sama. Hubungan antara keduanya bersifat dialektik, dalam arti struktur dan agensi saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung terus menerus, tanpa henti. Hubungan mereka bukanlah sebuah hubungan apa yang mempengaruhi apa maupun apa dipengaruhi apa. Namun, strukturasi didasarkan pada proposisi bahwa struktur itu selalu membebaskan dan mengekang (*enabling dan constraining*), begitu pula dengan agen, agensi dan kekuasaan.

Menurut Teori Strukturasi, domain kajian ilmu-ilmu sosial adalah praktik praktik sosial yang terjadi disepanjang ruang dan waktu. Maksudnya, aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu (Giddens, 2010:3).

Tampak sekali bahwa maksud dari teori strukturasi ini adalah berusaha untuk mengintegrasikan antara agen dengan struktur.

### **1) Agen dan Tindakan**

Bagi Giddens, yang dikutip Thompson (1984:240-241) (dalam Syahri:2015) individu adalah agen yang memiliki pengetahuan banyak (*knowledgeable agen*) dan kemampuan memahami tindakannya sendiri. Mereka bukan lapisan budaya atau para penopang hubungan sosial belaka, akan tetapi mereka adalah para aktor terampil yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang dunia yang mereka geluti.



Bagan 2.1. Model Stratifikasi Agen

Pengawasan refleksif atas tindakan merupakan satu unsur tetap dari tindakan sehari-hari dan melibatkan tidak hanya perilaku individu, namun juga perilaku dari individu-individu lainnya. Maksudnya, para aktor tidak hanya memonitor secara terus menerus arus aktivitas mereka dan orang lain melakukan hal yang sama, melainkan para aktor juga secara rutin memonitor aspek-aspek baik sosial maupun fisik, dari konteks-konteks tempat dimana mereka bergerak (Giddens, 2010:7-8).

Sedangkan yang dimaksud dengan rasionalisasi tindakan adalah bahwa para aktor-juga secara rutin dan kebanyakan tanpa perdebatan-

mempertahankan suatu pemahaman teoritis yang secara terus menerus tentang landasan-landasan aktivitas mereka (Giddens, 2010:8).

Tindakan merupakan sebuah proses berkesinambungan, sebuah arus yang didalamnya kemampuan introspeksi dan mawas diri yang dimiliki individu sangat penting bagi pengendalian terhadap tubuh yang biasa dijalankan oleh para aktor dalam kehidupan keseharian mereka.

Dengan konsep ini, Giddens memisahkan antara perbuatan seorang agen dari maksud kesengajaan perbuatan. Semakin jauh rentang dan waktu konsekuensi-konsekuensi dari konteks tindakan pertama, maka semakin kecil kemungkinan konsekuensi-konsekuensi disengaja- namun anggapan ini dipengaruhi oleh lingkup daya pengetahuan yang dimiliki oleh para aktor dan daya kuasa memobilisasi (Giddens, 2010:17).

## 2) Struktur dan Dualitas Struktur

Giddens memaknai struktur sebagai aturan dan sumber yang disusun sebagai sifat-sifat sistem sosial. Struktur hanya hadir sebagai sifat-sifat struktural. Sifat struktural atau lebih tepatnya sifat pemolaan merujuk pada sifat-sifat pemolaan yang memungkinkan untuk mengikat waktu dan ruang dalam sistem sosial. Giddens berpendapat bahwa sifat-sifat ini dapat dipahami sebagai aturan dan sumber daya, yang terus menerus terlibat ke dalam reproduksi sosial. Struktur bias dikonseptualisasikan secara abstrak sebagai dua aspek dari aturan, yaitu unsur-unsur normatif dan kode penandaan.

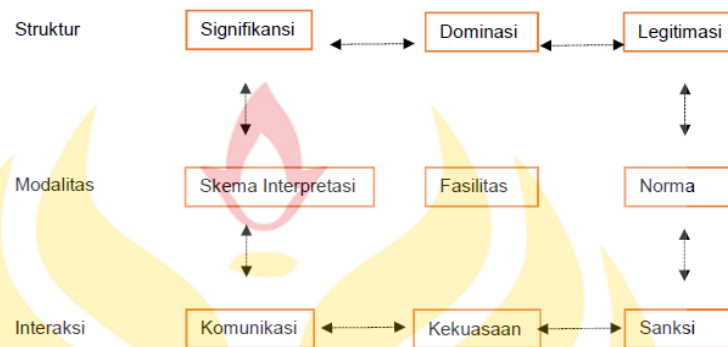
Sementara itu, dualitas struktur diartikan sebagai landasan utama bagi keterulangan-keterulangandalam reproduksi sosial di sepanjang ruang dan waktu. Menurut gagasan dualitas struktur, aturan dan sumber dayaditerapkan oleh para aktor dalam melakukan interaksi, namun sebagaikonsekuensinya juga ditanamkan ulang melalui interaksi semacam itu. Dengandemikian, struktur merupakan pola yang digunakan oleh hubungan antara momendengan totalitas untuk mengekspresikan dirinya dalam reproduksi sosial (Giddens,2010:124).

Basrowi (dalam Syahri, 2015:20) mengemukakan dualitas struktur memandang struktur dan agen berinteraksi dalam proses produksi dan mereproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial. Artinya, aktor merupakan hasil dari struktur, akan tetapi aktor juga menjadi media sebagai pembentukan struktur yang baru.

Menurut Giddens dalam prinsip struktural terdapat tiga gugus besar struktur, yaitu signifikasi, dominasi dan legitimasi (Giddens, 2010: 82, 29–33). Struktur signifikasi atau penandaan adalah struktur yang menyangkut simbolik, pemaknaan, penyebut dan wacana. Adapun struktur dominasi atau penguasaan mencakup penguasaan atau orang dan barang. Penguasaan atas orang berkaitan dengan politik. Sementara penguasaan terhadap barang berkaitan dengan bidang ekonomi. Struktur legitimasi atau membenaran menyangkut peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum.



Giddens menggambarkan relasi antara struktur dan juga tindakan sebagaimana bagan dibawah ini:



Bagan 2.2 Dualitas Struktur

Maka dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan apa yang oleh Giddens disebut *sosial practices*. Memang orang tidak boleh melupakan struktur dan agensi, bahkan seharusnya memahami secara detil struktur dan agensi. Namun fokus utama harus diletakkan pada *sosial practice*, yaitu bagaimana manusia-manusia menjalani hidup sehari-hari (Ashaf, 2006:213).

Secara singkat, teori strukturasi dapat digunakan untuk:

- 1) Menganalisis perilaku informal
- 2) Menganalisis relasi antara aktor dan struktur
- 3) Menganalisis relasi kuasa antara aktor dan struktur

## 2.1. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang juga mengkaji permasalahan yang sama dengan penulis adalah sebagai berikut:



- a.* Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Hasanah (2015) dengan judul Peran Dinas Pariwisata Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Wisata Goa Kiskendo: Studi Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Sementara tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata Kulon Progo dalam mengembangkan objek wisata Goa Kiskendo dan mengetahui dampak peran Dinas Pariwisata Kulon Progo dalam pengembangan objek wisata Goa Kiskendo bagi masyarakat Jatimulyo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata memiliki peran sangat penting dalam pengembangan potensi wisata Goa Kiskendo. Selain dampak positif, adapula dampak negatif yang terjadi, seperti adanya pertarungan ekonomi antara pemilik modal yang datang ke lokasi wisata dengan masyarakat setempat.
- Relevansinya dengan penelitian ini adalah kesamaan subjek penelitiannya yaitu Dinas Pariwisata, sedangkan topik penelitian yaitu membahas mengenai perandari Dinas Pariwisata.
- b.* Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rohim (2013) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa wisata (Studi Di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY). Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa wisata yang memiliki dampak pada sosial budaya maupun peningkatan kesejahteraan

ekonomi masyarakat sekitar. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya Desa wisata berasal dari gagasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, yang kemudian mendapat respon positif dari para penggerak masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa wisata Bejiharjo dilakukan dengan menerapkan berbagai bidang seperti atraksi, akomodasi dan penyediaan SDM. Namun, dibalik keberhasilan pengembangan Desa wisata Bejiharjo, ternyata masih menyimpan sebuah masalah, yaitu konflik persengketaan.

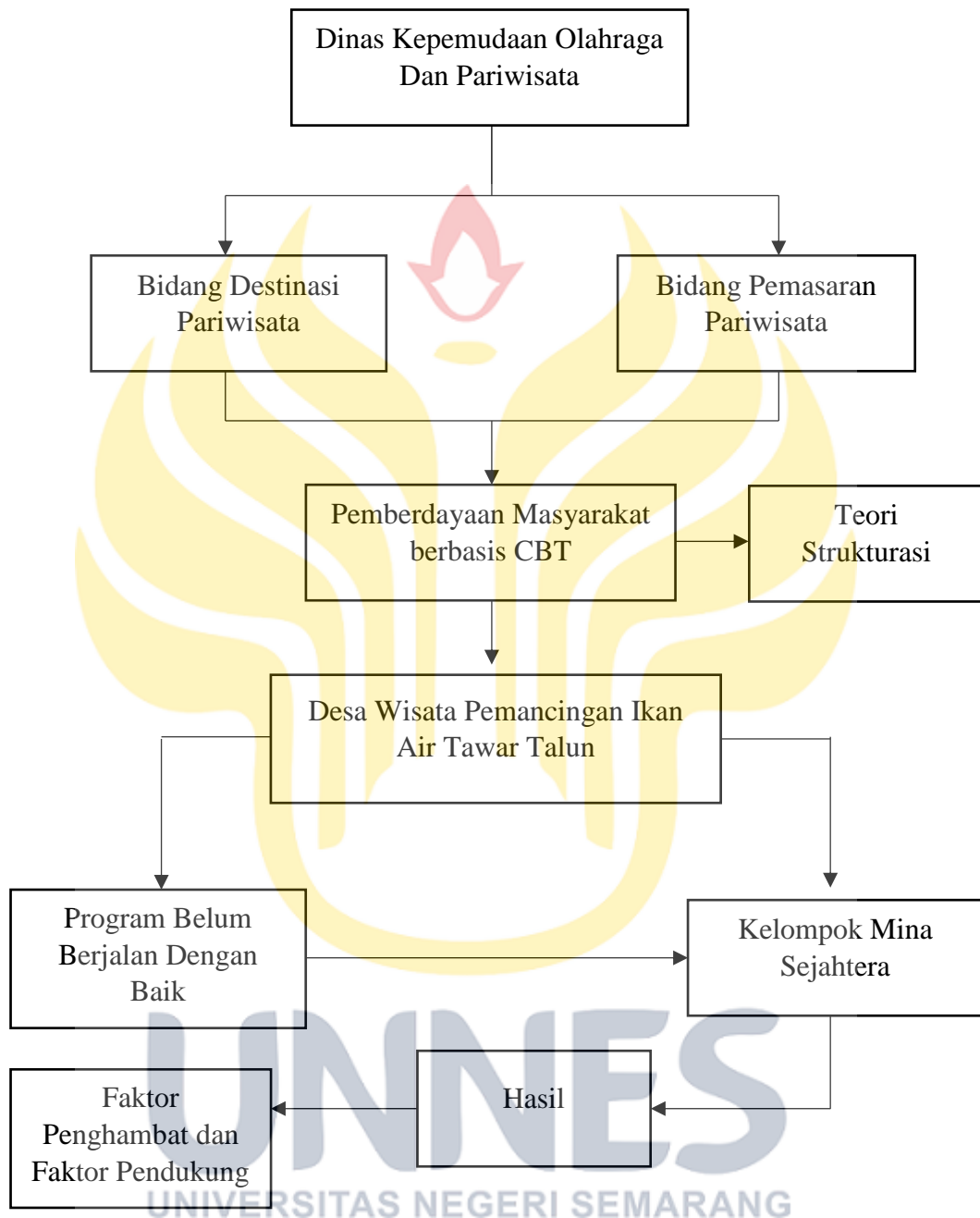
Relevansinya dengan penelitian ini adalah adanya kesamaan tujuan yaitu mengetahui pembangunan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat di Desa wisata.

## **2.2. Kerangka Berfikir**

Berdasarkan landasan teori yang telah diajukan, maka peneliti harus membuat kerangka berfikir agar lebih terarah. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Berdasarkan bagan tersebut Peran Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati Dalam Pembangunan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati), dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan pembangunan

Desa wisata berbasis *Community Based Tourism* membutuhkan proses yang panjang.

Penelitian mengenai peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati dalam pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan teori strukturasi yang melihat hubungan dialektis antara agen dan struktur, bagaimana agen dan struktur melakukan aktivitas atau praktik yang terus menerus. Adanya praktik sosial atau adanya hubungan antara agen dan struktur yang mana dalam hal ini adalah adanya hubungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan Kelompok Mina Sejahtera yang melakukan suatu tindakan dalam pembangunan dan pengelolaan Desa Wisata Talun akan menghasilkan bagaimana peran Dinas kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pembangunan Desa Wisata Talun.

Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata sebagai struktur Pemerintah, diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki tugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata. Dalam menjalankan tugasnya di bidang pariwisata, Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata dibantu oleh Bidang Destinasi Pariwisata dan juga Bidang Promosi Wisata.

Terciptanya pemberdayaan berbasis masyarakat ini, tentu saja dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa

wisata pemancingan air tawar. Diantaranya adalah adanya program-program dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Bidang Pariwisata yang masih belum maksimal, diantaranya adalah pembinaan dan pelatihan yang sifatnya kondisional, kebutuhan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, serta kurangnya kemitraan yang dijalin dengan *stakeholder*.

Sebagai agen/aktor, Bidang Destinasi Pariwisata dan juga Bidang Promosi Wisata memiliki program untuk meningkatkan potensi pariwisata. Salah satunya yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai agensi/tindakan dari agen dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat Desa wisata Talun agar mampu mandiri dalam proses pembangunan pariwisata. Oleh karena itu pembangunan Desa wisata harus dilakukan secara komprehensif-integral melalui pemberdayaan berasaskan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *Community-Based Tourism*.

Peran Pemerintah Daerah terutama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sangat penting, mengingat dalam struktur sosial Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki tanggung jawab di bidang pariwisata. Akan tetapi, karena keterbatasan yang dimiliki Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata membuat Kelompok Mina Sejahtera memiliki kekuatan untuk melakukan pengelolaan sumber daya pariwisata secara kolektif. Dari hasil proses tersebut, tentu akan menghasilkan faktor yang mempengaruhi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam

melakukan pembangunan Desa wisata Talun, baik faktor penghambat maupun faktor pendukung.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Strukturasi politik dalam Pemerintahan belum tentu menjembatani strukturasi sosial masyarakat dalam satu sistem. Karena, Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melalui Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Promosi Pariwisata secara signifikansi belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Meskipun Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki legitimasi yang kuat, akan tetapi secara dominasi Kelompok Mina Sejahtera dalam struktur sosial lebih kuat dibandingkan agen dan struktur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Oleh sebab itu, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata hanya mampu memonitoring segala kegiatan yang dilakukan di Desa wisata Talun agar sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Peraturan.
2. Model pemberdayaan yang digunakan adalah dengan cara *delegating*. Yaitu dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki desa wisata Talun yaitu melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha di lokasi objek wisata kolam/kolam pemancingan. Selanjutnya, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memberikan pelatihan untuk pengelolaan pariwisata dan pengelolaan pembudidaya

ikan untuk meningkatkan potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.

3. Dari Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan wisata pemancingan air tawar Desa Talun, dipengaruhi dua faktor. Yaitu faktor penghambat dan juga faktor pendukung.

- a) Faktor Penghambat

Faktor penghambat ini meliputi terbatasnya sumber daya manusia, kekhawatiran adanya investor, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata pemancingan ikan air tawar Talun. Akan tetapi, yang menjadi kendala utama adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pengembangan wisata Desa Talun.

- b) Faktor Pendukung

Faktor pendukung Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan wisata pemancingan air tawar ini meliputi tersedianya anggaran, berjalannya kemitraan antara Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan kelompok pembudidaya ikan Mina Sejahtera, serta kemandirian masyarakat Desa Talun yang berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi mereka.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:



1. Sebagai satu-satunya wisata minat khusus yang ada di Kabupaten Pati, Pemerintah Daerah seharusnya bisa lebih fokus mengembangkan potensi yang ada di Desa Talun dengan cara memberikan fasilitas yang memadai, melakukan penataan ruang agar wisata pemancingan di Desa Talun lebih banyak diminati oleh wisatawan.
2. Dengan adanya peluang yang dimiliki Desa wisata Talun, seharusnya Pemerintah Daerah mampu merangkul masyarakat agar mau berkontribusi secara penuh untuk bersama-sama mengembangkan Desa wisata Talun dengan memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan secara rutin serta mengkoordinasikan dengan baik kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mengembangkan Desa mereka menjadi Desa wisata yang mampu memberdayakan sumber daya manusianya, diantaranya melalui kelompok masyarakat seperti Pokdarwis dan PKK agar mampu berjalan sebagaimana mestinya.
3. Harus ada regulasi atau aturan mengenai kebijakan pengembangan Desa Wisata Minat Khusus, dengan melibatkan *stakeholder* yang ada dalam pengambilan keputusan. Mengingat, kekuatan yang dimiliki Desa wisata Talun sangat layak untuk dilindungi dengan Peraturan Daerah.
4. Struktur sosial dari pemerintahan perlu diperbaiki sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan.

5. Adanya relasi antara Pemerintah dengan organisasi atau paguyuban pariwisata agar mampu memahami setiap potensi yang ada di daerah.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Basrowi, dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handoyo, Eko. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya Press.
- Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Jamaludin, A. N. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pitana, I. G., dan Diarta, K. S. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.
- Pitana, I. G., dan Gayatri, P. G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.
- Sairin, S. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, S. W., dan Meinarno, E.A. 2015. *Teori Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemarno. 2010. Desa wisata. In W. Nuryanti, *Concept, Perspective and Challenges*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soetomo. 2008. *Strategi Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhardono, Edi. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia. Pustaka Utama.
- Suharto, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Suyanto, B., dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Usman, S. 2015. *Esai Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wibowo. 2015. *Perilaku dalam Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

#### **JURNAL**

Ashaf, A. F. 2006. Pola relasi media, negara, dan masyarakat: teori strukturasi Anthony giddens sebagai alternatif. *Sosiohumaniora*, 8(2), 205.

Fitrianti, H. 2014. *Strategi Pengembangan Desa wisata Talun Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat*. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1).

Karim, A. 2017. *Pariwisata dan Kekuasaan: Sebuah Telaah Faucauldian*. *Jurnal Kajian Ruang Sosio-Budaya*, 1(1), 81-106.

Ma'ruf, M. F., Kurniawan, B., dan Pangestu, R. P. 2017. *Desa wisata: Sebuah Upaya Mengembangkan Potensi Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul*. *Dinamika Governance*, 7(2).

Rohimah, A., Hariyoko, Y., dan Ayodya, B.P. 2019. *Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Melalui Pendekatan Community Based Tourism (CBT) Desa Carang Wulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(4)

Sumbi, K., dan Firdausi, F.2016.Analisis Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Pengembangan Sumber Daya Masyarakat. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2).

Susfenti, N.E.M.2016.Pengembangan Desa wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism-CBT) Di Desa Sukajadi Kecamatan Carita.*Lembaran Masyarakat:Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1),75-86

Syafi'I, M., dan Suwandono, D.2015.Perencanaan Desa wisata Dengan Pendekatan Konsep Community Based Tourism-CBT Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.*Jurnal Ruang*, 1(2), 51-60

Yudiyanti, Y., dan Rahayu, S. 2014. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism). *Jurnal. Hlm*, 7

### SKRIPSI

Khasanah, Zahrotul. 2015. Peran Dinas Pariwisata Kulon Progo Dalam Pengembangan Potensi Wisata Goa Kiskendo; Studi Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo.*Skripsi.Yogyakarta : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Rohim, Abdur. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa wisata (Studi Di Desa wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul,DIY).*Skripsi.Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Sofyan, M.A. 2016.Analisis Peran Retribusi Dalam Meningkatkan Perkembangan Pariwisata: Studi Kasus Di Obyek Wisata Pembudidaya Ikan Air Tawar Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. *Skripsi. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*

Syahri, Moch. 2015. Anthony Giddens dan Teori Strukturasi. *Mata kuliah Disertasi Teori*. Surabaya: Universitas Airlangga

### WEBSITE

<http://disporapar.jatengprov.go.id/content/files/Statistik%20Pariwisata%20Jawa%20Tengah%202015.pdf> (2 Feb 2019)

<https://m0j0agung.wordpress.com/2018/08/22/151/> (18 Agust 2019)

<https://www.patikab.go.id/v2/> (2 Feb 2019)

[https://www.researchgate.net/publication/273122669\\_Pengembangan\\_Ekonomi\\_Kreatif\\_Sebagai\\_Penggerak\\_Industri\\_Pariwisata\\_Kabupaten\\_Purworejo\\_Jawa\\_Tengah](https://www.researchgate.net/publication/273122669_Pengembangan_Ekonomi_Kreatif_Sebagai_Penggerak_Industri_Pariwisata_Kabupaten_Purworejo_Jawa_Tengah) (16 Agust 2019)